

# MANTAN MILITER DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018

**Ruth Agnesia Sembiring**

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Brawijaya. Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia.*

Korespondensi Penulis. E-mail: [nesi.biring@gmail.com](mailto:nesi.biring@gmail.com), Telp: +6282165962788

## **ABSTRACT**

*The emergence of military former in Governor Election 2018 become interesting phenomena in Indonesia. Candidate popularity in digital era become important indicator and social media become one of the channels to build "image" in order to be popular in eyes of voters. North Sumatra is one of provinces which conduct Simultaneous Regional Head Elections. Two candidates pair have been established by General Election Commissions of North Sumatra. One of governor candidate is military former, namely Edy Rahmayadi. This study try to review how that candidate uses social media as the channels to increase his popularity and how political issues map whose he lift to herd public opinion toward military former in governor election. Qualitative research was used in this study and Instagram (IG) was chosen to analyze how military former build his image to earn communities support.*

*Key Words: Governor Election of North Sumatra, military former, instagram.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia akan melaksanakan perhelatan akbar pada Tahun 2018, yaitu Pemilihan Kepala Daerah serentak seluruh nusantara. Dari semua calon kepala daerah tersebut, ada 5 (lima) calon yang merupakan mantan prajurit: 4 (empat) orang dari mantan perwira Polri dan 1 (satu) orang dari mantan perwira militer yaitu Edy Rahmayadi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Pengamat Intelijen dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS),<sup>1</sup> Khairul Fahmi mengatakan bahwa kepercayaan diri seorang jenderal untuk terjun dalam dunia politik muncul karena popularitas yang telah dimiliki mereka. Jabatan adalah modal bagi para jenderal karena mereka merasa popularitas dan elektabilitasnya cukup layak untuk dikelola atau dimanfaatkan pada pilkada. Hal tersebut didukung ketika partai politik tidak memiliki kader yang potensial untuk maju pada pilkada. Partai-partai politik kemudian cenderung lebih memilih perwira tinggi militer daripada mengungus kadernya sendiri yang belum siap secara popularitas maupun finansial.

Popularitas pejabat militer tentunya bertolak belakang dengan asumsi yang berkembang pada sebagian masyarakat bahwa keikutsertaan mantan militer dalam pemilihan umum akan menghambat terbentuknya *civic society* dan kembalinya TNI ke panggung politik praktis.<sup>2</sup> Syahnakri menuliskan dalam bukunya "*Aku Hanya Tentara*" bahwa Litbang Kompas pernah melakukan jajak pendapat pada Mei 2005 mengenai sosok militer dalam pilkada. Laporan

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180108085325-32-267327/hasrat-politik-para-jenderal-di-pilkada-2018>. Diakses pada 15 Maret 2018.

<sup>2</sup> Kiki Syahnakri, 2009, *Aku Hanya Tentara (Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan)*, Kompas, Jakarta, hlm 226, 228.

dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa proses demokrasi yang mengisyaratkan supremasi sipil ternyata masih jauh dari harapan. Reformasi telah berusaha menarik militer untuk tidak terlibat dalam politik. Namun Reformasi juga telah membuka jendela kebebasan selebar-lebarnya memunculkan kultur kekerasan, hingga konflik horizontal di beberapa daerah.

Intervensi militer dalam politik menurut Harold Crouch (1985)<sup>3</sup> berkaitan dengan kondisi politik yang berupa kegagalan pemerintah sipil untuk menjaga stabilitas politik dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang memuaskan hati masyarakat. Kegagalan tersebut menyebabkan hilangnya legitimasi pemerintah sipil dan membuat mereka rentan terhadap tuntutan perubahan yang berdasarkan kekerasan dari masyarakat. Beberapa masyarakat kemudian memikirkan suatu keadaan masyarakat pada masa Orde Baru yang dinilai sebagian masyarakat lebih aman dan stabil. Pemikiran tersebut juga membuahkan perhatian beberapa masyarakat kepada figur militer, sebagaimana mana Indonesia yang dipimpin seorang mantan militer pada saat itu. Hal tersebut dapat menguatkan kekuatan militer untuk kembali ke dunia politik dengan basis yang lebih kokoh seperti melalui pilkada.

Militer seringkali dikaitkan dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang juga mantan militer. Corak dan sistem politik model otoritarian pada Era Soeharto telah menempatkan birokrat, teknokrat, dan militer sebagai aktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses politik dan suatu kebijakan. Hasil survey *Power, Welfare, and Democracy* (PWD) 2013 sebagaimana yang ditulis oleh Haryanto (2017) menempatkan militer sebagai aktor dominan dan juga sebagai aktor alternatif.<sup>4</sup> Aktor dominan yaitu merujuk kepada mereka yang sebagian besar menduduki jabatan formal pemerintahan serta memiliki akses langsung terhadap penyusun kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Sedangkan aktor alternatif adalah mereka yang menguasai wacana publik, namun tidak memiliki akses langsung terhadap pengambilan keputusan. Militer yang menduduki posisi sebagai aktor dominan memiliki keterkaitan dengan Orde Baru sebanyak 38,5%, sedangkan militer yang menduduki posisi sebagai aktor alternatif secara keseluruhan (100%) memiliki keterkaitan dengan Orde Baru.

Kiki Syahnakri (2009) yang merupakan Letjen Purnawirawan TNI,<sup>5</sup> menyatakan bahwa pada militer yang telah pensiun terdapat PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD). PPAD bukanlah parpol dan bukan pula ormas yang berorientasi atau berafiliasi kepada kekuatan politik tertentu, melainkan lebih bersifat forum/paguyuban yang tidak berorientasi “politik praktis.” Tujuan utama dari organisasi PPAD adalah untuk memaksimalkan perhatian bagi para purnawirawan AD sekaligus menyalurkan aspirasi mereka yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Jika ada anggota PPAD yang terjun ke dunia politik praktis (menjadi pengurus parpol, anggota DPR melalui pemilu), maka yang bersangkutan berkiprah sebagai pribadi yang otonom, bukan mewakili PPAD. Kendatipun tidak berorientasi kekuasaan (politik praktis), PPAD tetap peduli dan mencermati dinamika politik nasional dan politik lokal, dan secara proaktif-kritis terhadap keputusan pemerintah yang dianggap membahayakan kepentingan nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa militer yang sudah berstatus purnawirawan juga masih punya kemampuan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

---

<sup>3</sup> Harold Crouch, 1985, *Military-Civilian Relations in South-East Asia*, Oxford University Press, New York, page 294.

<sup>4</sup> Prisma, Volume 36, 2017, Negara, Kesejahteraan dan Demokrasi, LP3ES, Depok, hlm 23, 28-30.

<sup>5</sup> Kiki Syahnakri, 2009, *Op.Cit.*, hlm 13-17.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sumber popularitas militer adalah jabatan dan posisi yang mereka emban. Militer yang menduduki posisi sebagai aktor dominan memperoleh popularitasnya melalui kemampuan mereka dalam mempengaruhi suatu kebijakan atau keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah. Tidak jarang para perwira militer wara-wiri pada media massa untuk memberikan pernyataan atas suatu peristiwa. Sedangkan militer yang menduduki posisi sebagai aktor alternatif memperoleh popularitasnya melalui bakat mereka dalam menguasai wacana publik, sehingga mereka memiliki basis massa.

Salah satu saluran untuk meningkatkan popularitas perwira militer adalah melalui media sosial (medsos) seperti *Instagram*. *Instagram* digunakan untuk menampilkan informasi hingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan perwira militer yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 menggunakan *Instagram* (IG) sebagai saluran untuk meningkatkan popularitas. Studi ini fokus pada mantan militer yang menggunakan IG sebagai media untuk meningkatkan popularitas pada masyarakat, khususnya generasi *millennial*. Sebagian besar calon kepala daerah dalam unggahan di media sosial akan menampilkan kegaitan-kegiatan seperti mengunjungi anak-anak sekolah; mengunjungi anak-anak yatim piatu; menyantuni kaum difable dan masyarakat marginal; mengunjungi korban bencana alam hingga kunjungan ke pasar-pasar tradisional. Hal tersebut berbeda dengan dua mantan militer yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, di mana pada medsos mereka terdapat banyak unggahan dengan para anggota militer. Adapun dua calon gubernur dan akun IG para calon gubernur adalah sebagai berikut:

1. Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dengan nama akun IG [@djarotsaifulhidayat](#); Pasangan calon didukung oleh PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
2. Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dengan nama akun IG [@edy\\_rahmayadi](#) dan [@EdyRahmayadiOfficial](#). Pasangan calon ini didukung oleh Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional), Golkar (Golongan Karya), serta Nasdem (Nasional Demokrat), Hanura (Hari Nurani Rakyat), PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Edy Rahmayadi telah menggunakan IG jauh sebelum mendaftarkan diri secara resmi sebagai calon gubernur di kantor KPU. Edy Rahmayadi mulai menggunakan IG pada 15 Agustus 2017 dengan foto unggahan pertamanya (dengan seragam militer) bersama para anggota Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) dan melampirkan *hashtag* “#SumutBermartabat” yang merupakan salah satu slogan yang menjadi ciri khas Edy pada setiap unggahannya.<sup>6</sup>

Untuk generasi *millennial* yang dimaksud oleh penulis adalah mereka yang berusia 17-38 tahun. Istilah genarasi *millennial* diciptakan oleh penulis Amerika, William Straus dan Neil Howe dalam beberapa buku mereka.<sup>7</sup> Generasi *millennial* juga disebut sebagai generasi Y atau *echo boomer*. Penggolongan generasi *millennial* yaitu mereka yang lahir pada 1980-1990, atau pada awal 2000 dan seterusnya (yang saat ini berusia 17-38 tahun). Perkembangan teknologi membuat para generasi *millennial* mengandalkan media sosial sebagai tempat

---

<sup>6</sup> Hasil pengamatan penulis melalui instagram @edy\_rahmayadi.

<sup>7</sup><http://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial/> Diakses pada 9 Februari 2018.

untuk mendapatkan informasi terkini. Media sosial telah menjadi *platform* pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat *millennial*. Selain itu, mereka juga menggunakan internet sebagai tempat untuk memperoleh atau berbelanja beragam produk dan jasa. The Nielsen Global Survey of E-Commerce mencatat, pertumbuhan penetrasi perangkat mobile di kota-kota besar Indonesia mencapai 88%. Rata-rata generasi *millennial* mengalihkan perhatian pada berbagai gawai (English: *gadget*), seperti PC (*Personal Computer*), *smartphone*, tablet, dan televisi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali setiap jam.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebut di atas, maka studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana para mantan militer yang bertarung dalam pilgub Sumatera Utara menggunakan IG untuk membangun popularitasnya pada generasi *millennial*, informasi dan kegiatan apa saja yang mereka tampilkan untuk menarik simpati dan kepercayaan generasi *millennial*. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjawab sejauh mana relevansi dari popularitas mantan militer dengan aspek kepemimpinan dan pertanggungjawaban terhadap publik nantinya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Harold Crouch (1985) mengatakan bahwa intervensi militer dalam politik fokus pada karakteristik militer itu sendiri dan lingkungan internal di mana ia beroperasi.<sup>8</sup> Faktor internal dapat dianalisis dari dua hal, yaitu *pertama* nilai-nilai dan sikap perwira militer yang mempengaruhi orientasi mereka pada politik dan konsepsi mereka mengenai peran mereka untuk masyarakat. *Kedua*, kepentingan material perwira militer — baik sebagai anggota dari suatu badan hukum, sebagai anggota dari kelas sosial, atau sebagai individu. Faktor eksternal atau lingkungan dibahas dalam tiga hal, yaitu: kondisi sosial-ekonomi, keadaan politik dan faktor internasional.

Tidak jauh berbeda dengan Harold, latar belakang masuknya militer dalam pentas politik di negara sedang berkembang seperti di Indonesia, menurut Haryanto (2005) dapat dilihat dari dua faktor.<sup>9</sup> Pertama, faktor internal atau dengan kata lain mengacu pada kondisi di dalam tubuh militer itu sendiri. Ada ambisi sekelompok perwira militer untuk menggenggam kekuasaan yang dapat digunakan untuk mengendalikan pemerintahan. Kedua, faktor eksternal atau dengan kata lain mengacu pada keadaan yang ada di luar militer. Ada ketidakstabilan sistem politik yang bermula dari kebangkrutan ekonomi, korupsi yang merajalela sampai dengan pertikaian antara sesama kelompok sipil yang tidak kunjung selesai.

Menurut Haryanto (2002)<sup>10</sup> hadirnya militer dalam pentas politik dapat memberikan dampak positif atau pun keberuntungan bangsa yang bersangkutan, misalnya relatif lebih mudah mewujudkan kestabilan politik, lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Namun di sisi lain, hadirnya militer dalam pentas politik dapat memberikan dampak negatif, misalnya munculnya rejim militer yang kurang bahkan cenderung tidak memberikan ruang gerak bagi demokrasi di masyarakat. Kondisi seperti ini pada gilirannya menjadi penghambat bagi kelangsungan pembangunan politik, dan memberi peluang lebih mengutamakan pembangunan militer daripada pembangunan sektor-sektor lainnya.

---

<sup>8</sup> Harold Crouch, 1985, *Op.Cit.*, page 288.

<sup>9</sup> Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elite suatu Bahasan Pengantar*, Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, hlm 109-110.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 110.

Hadirnya mantan militer di satu sisi dianggap dapat menciptakan kestabilan politik, namun di sisi dianggap menghambat ruang gerak bagi terwujudnya demokrasi. Maka dari itu, penting bagi mantan militer untuk meyakinkan masyarakat bahwa hadirnya mereka dalam pentas politik bukanlah mempersempit ruang gerak demokrasi. Pandangan bahwa kehadiran militer dalam pentas politik dapat mempersempit ruang gerak demokrasi di masyarakat merupakan “pekerjaan rumah” yang harus dibenahi mantan militer.

Penggunaan media komunikasi untuk mengubah “image” negatif masyarakat mengenai militer merupakan hal yang penting. Media komunikasi merupakan pusat perhatian sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi masyarakat melalui pesan-pesan komunikasi yang telah diinterpretasikan.<sup>11</sup> Instagram dapat digunakan mantan militer sebagai media komunikasi untuk mengubah pandangan publik atau pun opini publik terhadap militer dan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menurut A.V. Dicey (dalam Harun, 2006), pendapat umum merupakan “*supernatural power*” atau kekuatan luar biasa yang dapat mendukung atau menghantam penguasa karena penguasa harus hati-hati terhadap pendapat umum terutama terhadap dampak yang ditimbulkan. Dampak pandangan umum atau opini publik bisa merupakan dampak positif seperti masyarakat menjadi simpatik, mengagumi dan mendukung. Opini publik juga bisa merupakan dampak negatif seperti ketidakpercayaan publik, anti terhadap golongan tertentu. Dalam peristiwa politik seperti pemilihan umum, intensitas perhatian kandidat terhadap media sosial akan meningkat. Kandidat seperti mantan militer akan semakin gencar menyampaikan informasi pribadinya, prestasinya, hingga pemetaan isu agar semakin populer di mata masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada subjudul ini akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu jenis penelitian; waktu dan tempat penelitian; subjek penelitian; prosedur dan juga teknik analisis yang digunakan penulis untuk mencari data atau informasi. Berikut ini penulis akan menjabarkan hal-hal tersebut dalam beberapa subjudul dalam Metodologi Penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan *Instagram* (IG) sebagai media sosial (medsos) yang diamati oleh penulis karena kedua mantan militer yang maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara menggunakan medsos tersebut sebagai media untuk membangun popularitas.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penulis mengkaji instagram yang digunakan oleh kedua mantan militer yang maju dalam Pilgub Sumut 2018 dari tempat kediaman penulis, yaitu Kota Malang, Jawa Timur. Untuk mengkaji kegiatan-kegiatan dan isu-isu politik yang ditampilkan mantan militer tersebut, penulis mengkaji sejak Edy membuat akun IG-nya, yaitu dimulai pada Agustus 2017 hingga pengamat terakhir penulis pada Maret 2018.

---

<sup>11</sup> Rochajat Harun & Sumarno, 2006, *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*, Mandar Maju, Bandung, hlm 13 & 34.

### 3. Subjek Penelitian

Pembahasan pada Pendahuluan menjelaskan bahwa ada militer yang terkait dengan Orde Baru dan ada yang tidak terkait dengan Orde Baru, dimana posisi sebagai aktor alternatif secara keseluruhan memiliki keterkaitan dengan Orde Baru. Hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana para mantan militer tersebut dapat menguasai wacana publik melalui popularitas, khususnya kepada generasi *millennia* (17-38 tahun); bagaimana menarik dukungan suara dari generasi *millennial* yang kemudian dapat menghantarkan mereka pada posisi sebagai pembuat kebijakan publik.

Bagi penulis, generasi *millennial* apa lagi mereka yang masih terlalu dini untuk mencermati keadaan sosial-ekonomi-politik pada massa Orde Baru (misalnya untuk generasi *millennial* yang lahir di akhir tahun 1990-an dan sekarang berstatus sebagai pemilih pemula [18 tahun]). Mereka yang tergolong pemilih pemula tersebut tentunya hanya memperoleh informasi dari referensi-referensi tertentu tanpa pengalaman langsung untuk memahami seperti apa pemerintahan Orde Baru. Namun hal tersebut tentu berbeda dengan generasi *millennial* yang sempat merasakan pemerintahan Orde Baru, yaitu mereka yang lahir di tahun 1980-an hingga 1990-an.

Subjek dalam penelitian ini adalah Edy Rahmayadi melalui akun IG-nya yaitu [@edy\\_rahmayadi](#). Alasan penulis hanya mengamati salah satu akun IG Edy yang penulis sebut di atas (bukan akun [@EdyRahmayadiOfficial](#)) karena akun [@edy\\_rahmayadi](#) merupakan akun yang pertama kali dibuat oleh Edy. Dengan mengamati akun IG Edy Rahmayadi, penulis dapat menganalisis tujuan terisrat dalam setiap unggahan untuk membangun citra, popularitas, sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari generasi *millennial*. Adapun jumlah *followers* pada akun [@edy\\_rahmayadi](#) sebanyak 4987 *followers*, dengan unggahan pertama Edy pada 15 Agustus 2017.<sup>12</sup>

### 4. Prosedur

Prosedur yang dipakai penulis dalam studi ini adalah dengan mengamati dan pemilihan unggahan-unggahan pada akun Edy Rahmayadi. Unggahan yang dipilih penulis adalah unggahan dari akun [@edy\\_rahmayadi](#) yang berisi pernyataan terkait TNI, slogan, hastag, foto para prajurit TNI, hingga kandidat yang bersangkutan ketika menggunakan seragam TNI (seperti pada unggahan Edy). Untuk *hastag* pada IG, ada beberapa *hastag* yang selalu ditampilkan pada setiap unggahan akun IG Edy Rahmayadi yang menjadi bahan analisis bagi penulis terkait upaya mantan militer tersebut untuk membangun citra dan menggiring opini generasi *millennial* terhadap figurnya. *Hastag-hastag* tersebut sering muncul secara bersamaan pada setiap unggahan. Beberapa *hastag* pada akun [@edy\\_rahmayadi](#), yaitu:

[#EdySumut2018](#),  
[#SumutBermartabat](#),  
[#AyahEdy](#),  
[#Bersatu](#), [#BarisanEdyRahmayadiSumateraUtara](#), [#Winner](#),  
[#Sumut2018](#),  
[#SumutAman](#),  
[#sumut1](#),  
[#KabarEdyRahmayadi](#),

---

<sup>12</sup> Pengamatan terakhir Penulis pada 14 Maret 2018.

#AksiNyata, dan  
#1SumutMaju.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam studi ini penulis melakukan pengamatan dan pemilihan terhadap akun IG Edy Rahmayadi untuk memisahkan unggahan terkait fokus penulis, yaitu “militer” dengan unggahan-unggahan yang lain pada akun mereka yang tidak menyinggung atau menampilkan figur militer. Hal ini untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data melalui unggahan pada IG mereka. Setelah penulis melakukan analisis data, penulis kemudian membahasnya dengan beberapa point yang penulis jabarkan melalui beberapa subjudul pokok bahasan dan hasil kajian ini. Subjudul pokok bahasan dan hasil kajian ini yaitu:

1. Kontroversi Keterlibatan Militer dalam Pemilihan Kepala Daerah,
2. Karakter Pemimpin: Tegas, Disiplin, Cepat Tanggap *ala* Militer, dan
3. Dukungan dari Keluarga Militer: Dapatkah Menjadi Modal untuk Kemenangan?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kontroversi Keterlibatan Militer dalam Pemilihan Kepala Daerah

Sebagaimana yang telah disebutkan pada tinjauan pustaka bahwa intervensi militer dalam politik fokus pada karakteristik militer itu sendiri dan lingkungan sekitarnya (Harold, 1985). Karakteristik militer mengacu pada orientasi perwira militer pada politik, konsepsi perwira militer mengenai peran mereka bagi masyarakat, kepentingan mereka sebagai anggota dari kelas sosial atau pun sebagai individu.<sup>13</sup> Sedangkan untuk faktor lingkungan berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi, keadaan politik dan faktor internasional.

Kehadiran Edy dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara terkait dengan bagaimana orientasi dan konsepsi Edy mengenai perannya untuk membangun masyarakat dan daerah asalnya, dan tidak ketinggalan kepentingan material yang ia harapkan ketika menduduki suatu jabatan publik. Faktor eksternal atau lingkungan, sebagaimana yang dibahas dalam pendahuluan tulisan ini bahwa suatu keadaan yang lebih aman dan stabil dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat telah membuat sebagian masyarakat Indonesia memiliki kerinduan akan figur militer sebagai pemimpin. Hal tersebut kemudian didukung keadaan politik di mana partai-partai politik yang dinilai gagal menghasilkan pemimpin dari kalangan sipil yang berkenan bagi masyarakat. Untuk faktor internasional, penulis belum dapat menganalisis faktor internasional yang mendorong keterlibatan militer dalam politik.

Langkah partai-partai politik yang memboyong perwira militer aktif menjadi calon kepala daerah memunculkan kritik dari masyarakat. Edy Rahmayadi masih berstatus sebagai perwira militer aktif saat dirinya menyatakan hasrat menjadi gubernur Sumatera Utara. Hasratnya tersebut disambut baik dan didukung oleh beberapa partai politik. Edy begitu aktif mencari kendaraan politik selama tahun 2017,<sup>14</sup> misalnya dengan “melamar” 13 (tiga belas) partai politik demi mendapatkan dukungan partai politik. Beberapa partai politik yang pernah dijajaki oleh Edy adalah PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan, Golkar (Golongan

---

<sup>13</sup> Harold Crouch, 1985, *Op.Cit.*, page 288.

<sup>14</sup><https://tirto.id/perang-perwira-tni-dan-polri-dalam-pilkada-2018-cCIM>. Diakses pada 15 Maret 2018.

Karya), Demokrat, Hanura (Hari Nurani Rakyat), PPP (Partai Persatuan Pembangunan, dan Nasdem (Nasional Demokrat). Gerindra merupakan partai politik yang pertama kali menunjukkan keseriusan untuk menerima “pinangan” dari Edy.

Pendekatan yang dilakukan Edy kepada partai-partai politik sementara statusnya masih sebagai Pangkostrad pada saat itu, dianggap sebagai suatu perkara yang tidak etis karena tentara harus tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun pembelaan datang dari politisi Gerindra,<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Edy saat itu hanya sebatas “komunikasi dengan partai” dan hal tersebut dipandang lumrah dalam perpolitikan Indonesia. Baginya pada perpolitikan Indonesia, tidak ada TNI atau pun Polri yang mengundurkan diri terlebih dahulu kemudian mengajukan diri sebagai calon gubernur. Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 7 (t)<sup>16</sup> menyebutkan bahwa calon gubernur yang berasal dari militer harus mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Negara Indonesia sejak mendaftarkan diri menjadi calon. Edy akhirnya pensiun dini setelah beberapa partai politik bersedia mengusung dirinya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Akan tetapi, yang menjadi sorotan publik dalam politik praktis yang Edy lakukan sebelum mengundurkan diri dari jabatan militer.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa popularitas perwira militer seperti Edy Rahmayadi dapat menjadi modal bagi partai politik maupun perwira militer yang bersangkutan untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Militer akan tetap punya kesempatan dalam pemilihan kepala daerah selama partai-partai politik tidak berhasil menghasilkan sosok pemimpin dari sipil yang berkanan bagi masyarakat, dan tidak ada kader-kader yang memiliki popularitas yang tinggi sebagai modal untuk memenangkan suara dalam pemilihan kepala daerah.

## **2. Karakter Pemimpin: Tegak, Disiplin, Cepat Tanggap ala Militer**

Karier terakhir Edy Rahmayadi di militer adalah sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (PANGKOSTRAD). Edy pensiun dini dari kesatuan militer demi keinginan mereka menjadi pemimpin daerah. Sebagai perwira militer, Edy pernah memimpin sejumlah prajurit atau bawahan, sehingga banyak unggahannya yang menampilkan kebersamaan dengan TNI. Berbeda dengan Djarot yang bukan dari militer, tetapi merupakan seorang pemimpin dari kalangan akademisi dan unggahan pada IG-nya juga hanya sekali menampilkan foto dirinya dengan pemimpin militer.<sup>17</sup>

Kedekatan dan kepedulian terhadap prajurit mulai diperlihatkan oleh Edy Rahmayadi pada unggahannya pada *instagram* bersama para prajurit Kostrad yang ia sebut sebagai “sahabat-sahabat” pada 15 Agustus 2017. Pada saat itu Edy Rahmayadi memang masih menjabat sebagai Pangkostrad walaupun sudah ada indikasi bahwa dirinya berkeinginan mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Hal tersebut bisa dilihat dari *hashtag* pada postingan tersebut, yaitu #sumutbermartabat, #sumutbersatu.

---

<sup>15</sup><https://tirto.id/perang-perwira-tni-dan-polri-dalam-pilkada-2018-cCIM>. Diakses pada 15 Maret 2018.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

<sup>17</sup> Pengamatan penulis pada 3 Maret 2018.



Edy dalam suatu kesempatan pernah berkata kepada media, “Doakan saya menjadi gubernur, bukan jadi KSAD.” (baca: Kepala Staf Angkatan Darat).<sup>18</sup> Sebelumnya, keinginan Edy untuk mundur dari jabatannya sebagai Pangkostrad tidak direstui oleh pemimpinya. Keputusan yang dikeluarkan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru, yaitu Keputusan Panglima TNI/982/XII/2017 tanggal 4 Desember, menunjukkan bahwa Edy Rahmayadi masih ditetapkan sebagai Pangkostrad. Dalam keputusan tersebut juga tidak ada rincian pasti mengenai kapan posisi Edy digantikan oleh perwira tinggi yang lain. Edy menilai keputusan tersebut menghalangi hasratnya untuk maju dalam Pilgubsu 2018.<sup>19</sup> Akan tetapi, Edy tetap berusaha melakukan *lobby*, sehingga keputusannya untuk mundur dari militer kemudian direstui pada Januari 2018.

Edy Rahmayadi juga pernah mengeluarkan pernyataan politik ketika masih menjabat sebagai Pangkostrad. Pernyataan tersebut ia unggah melalui akun IG-nya yang merupakan hasil *capture* Harian Waspada 4 Agustus 2017, yaitu “Pangkostrad: Tidak Ada Tempat Bagi Komunis Maju Jadi Cagubsu.” Hal tersebut menunjukkan bahwa Edy dengan jabatan militernya pada saat itu punya kemampuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan, khususnya untuk membantu pemberantasan ideologi komunis dan juga menghalangi penganut paham komunis untuk maju dalam Pilgubsu 2018. Selain itu, Edy mengunggah sebuah video mengenai latihan para prajurit Pangkostrad dan Polisi dalam persiapan pengawalan Raja Salman, dari Arab Saudi (19 Agustus 2017). Foto unggahan lain berisi kedermawanan para prajurit yang sedang memberi santunan berupa makanan bagi para gelandangan. Melalui akun IG-nya dapat dilihat bahwa ada banyak unggahan Edy bersama para prajurit atau pun unggahan dirinya sendiri dengan seragam militernya sambil menceritakan karier militernya sebelum mendaftarkan diri menjadi calon gubernur. Berdasarkan pengamatan penulis, unggahan terakhir Edy bersama para prajurit militer adalah<sup>20</sup> mengenai Serah Terima Jabatan Kostrad (16 Januari 2018) dan acara perpisahan Edy dengan seluruh keluarga besar Malang United (18 Januari 2018).

Unggahan-unggahan tersebut selain memperkenalkan dirinya agar lebih dikenal oleh masyarakat, juga dapat menjadi modal sosial untuk menarik hati dan memenangkan hati generasi *millennial*. Upaya para kandidat yang berusaha menunjukkan bahwa pelajaran dan pengalaman yang mereka dapat di dunia militer telah “menempah” mereka menjadi pribadi yang disiplin, tegas, dan cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat yang merupakan sikap ideal seorang pemimpin. Pelajaran dan pengalaman mereka di dunia militer telah “menempah” mereka menjadi pribadi yang memiliki rasa persatuan, kekeluargaan, setia kawan, rasa tolong-menolong yang erat.

### **3. Dukungan dari Keluarga Prajurit: Dapatkah Menjadi Modal untuk Kemenangan?**

Negara Indonesia memang melarang TNI untuk terlibat dalam politik praktis seperti mencalonkan diri dan memberikan suara pada pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia, yaitu pada Pasal Kedua.<sup>21</sup> Akan tetapi, keluarga para prajurit (istri dan anak-anak *millennial*-nya) merupakan modal

---

<sup>18</sup> <https://news.detik.com/berita/letjed-edy-doakan-saya-jadi-gubernur-bukan-ksad>. Diakses pada 9 Februari 2018.

<sup>19</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/12/20/p18gur385-pangkostrad-pengunduran-diri-saya-sudah-diterima>. Diakses pada 9 Februari 2018.

<sup>20</sup> Pengamatan terakhir penulis pada Rabu, 14 Maret 2018, pukul 12:57.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia.

sosial yang dapat menjadi sumber dukungan bagi mantan perwira militer untuk mendapatkan dukungan. Misalnya dalam Kostrad terdiri dari 35.000 sampai 40.000 tentara. Jika keluarga prajurit mendukung mantan pemimpin militer mereka, maka suara yang dapat diperoleh dari para istri dan anak-anak *millennial* para prajurit dapat modal dukungan dalam perlombaan pemilihan gubernur. Dukungan tersebut tergantung seberapa besar kepedulian para perwira militer kepada kebutuhan dan kesejahteraan para prajurit ketika mereka masih menjabat di militer. Logika sederhananya adalah kebaikan dan kebijakan seorang perwira militer akan diingat oleh para prajurit, istri dan anak-anak *millennial* mereka.

Keterlibatan militer dalam politik memiliki kepentingan korporasi tertentu (Harold Crouch: 1985),<sup>22</sup> ia menuntut alokasi anggaran yang cukup dari pemerintah untuk memperoleh peralatan dan persenjataan yang memadai, untuk menyediakan perumahan yang memadai bagi anggotanya, barak dan fasilitas lainnya, serta untuk membayar gaji dan upah yang memuaskan. Ketika pemerintah gagal memenuhi kebutuhan korporat militer, perwira militer akan cenderung melakukan intervensi. Para perwira militer pada batas tertentu dapat dilihat sebagai wakil kelas menengah perkotaan. Meskipun para perwira militer tersebut tidak selalu berasal dari kelas menengah, status mereka sebagai perwira menempatkan mereka di kelas tersebut dan mereka biasanya menikah dengan keluarga kelas menengah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seorang perwira militer punya kedekatan dan tanggung jawab besar terhadap anggotanya, mulai dari menjamin segala perlengkapan senjata atau alutrista yang lain, penyediaan perumahan, barak hingga gaji dan tunjangan bagi keluarga militer. Dengan demikian, perwira militer akan berusaha mengintervensi kebijakan pemerintah untuk militer terkait kesejahteraan anggota. Ketika mereka berhasil mengintervensi suatu kebijakan yang dapat mendatangkan kesejahteraan anggota, maka mereka berhasil menjadi aktor dominan seperti yang dikemukakan oleh Haryanto (2017).<sup>23</sup> Militer juga dapat berhasil menempatkan diri mereka pada posisi aktor alternatif ketika masyarakat menganggap militer sebagai representasi kelas menengah.

Edy pernah berkiprah lama di Sumatera Utara pada Kodam Bukit Barisan pada 1998-2001 yang merupakan perjalanan panjang dan pastinya membekas pada hati para prajurit dan keluarga prajurit di Sumatera Utara. Selain itu klaim dirinya sebagai putra daerah yang selalu diutarakannya pada berbagai media massa dan media sosial, dapat menjadi modal sosial untuk mendapat dukungan dari kalangan keluarga prajurit pada khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa identitas Edy sebagai mantan prajurit dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk dipandang sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, cepat tanggap *ala* prajurit, sekaligus mendukung kesejahteraan keluarga para prajurit. Karakter pemimpin yang tegas, disiplin, cepat tanggap merupakan karakter yang diharapkan untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam masyarakat.

## **Simpulan, Saran, dan Implikasi**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa orientasi dan konsepsi perwira militer mengenai peran mereka pada masyarakat, keadaan sosial-ekonomi masyarakat, dan keadaan politik turut mendorong keterlibatan militer dalam

---

<sup>22</sup> Harold Crouch, *Op.Cit.*, page 290.

<sup>23</sup> Prisma, *Op.Cit.*, hlm 28.

pemilihan kepala daerah. Militer akan selalu punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah selama pemimpin dari kalangan sipil tidak dapat menciptakan suasana yang aman dan stabil dalam kehidupan sosial masyarakat dan tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Perwira militer yang memiliki popularitas yang tinggi akan selalu digandeng oleh partai-partai politik yang belum mampu menghasilkan pemimpin dari kalangan sipil yang berkenan bagi masyarakat.

Melalui *instagram*, banyak cara yang dilakukan Edy untuk meningkatkan popularitas mereka, dengan tujuan agar menarik simpati dan dukungan generasi *millennial*. Pada IG mereka bukan hanya menampilkan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh banyak calon kepala daerah, seperti mengunjungi anak-anak sekolah dan anak-anak yatim piatu dan sebagainya, namun mereka juga menunjukkan kedekatan mereka dengan militer. Penulis berangkat dari hal tersebut untuk melihat sejauh mana relevansi popularitas perwira militer dengan aspek kepemimpinan. Penulis menemukan bahwa Edy berusaha menunjukkan karakter pemimpin yang tegas, disiplin dan cepat tanggap *ala* militer pada generasi *millennial* untuk mendapatkan simpati. Edy menunjukkan “sepak terjangnya” ketika menjadi seorang perwira militer dan memimpin anggotanya. Bagi penulis hal tersebut dapat menjadi modal untuk memenangkan pemilihan gubernur, mengingat bahwa setiap perwira militer akan berusaha mengintervensi kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan prajurit militer dan tentunya hal tersebut akan membekas pada hati keluarga prajurit.

Untuk perspektif generasi *millennial* terhadap figur pemimpin dari kalangan militer dan Orde Baru, bagi penulis akan kurang mempengaruhi pemilih pemula. Namun untuk generasi *millennial* kelahiran Tahun 1980-an hingga Tahun 1990, perspektif terhadap figur pemimpin dari kalangan militer dan Orde Baru akan mempengaruhi pilihan mereka terhadap sosok pemimpin baru di Sumatera Utara nantinya.

## **2. Saran**

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, khususnya data mengenai jumlah unggahan pada akun Edy Rahmayadi yang menyinggung mengenai militer. Akun IG Edy Rahmayadi memiliki 800-an unggahan. Hal inilah yang menyebabkan keterbatasan penulis dalam memilah dan menjumlahkan setiap unggahan yang menyinggung militer, yang dapat penulis sampaikan adalah unggahan terkait militer tersebut lebih dari 20 (dua puluh) unggahan. Studi mengenai mantan militer dalam pemilihan kepala daerah akan menjadi lebih menarik apabila penulis dapat memperoleh data mengenai jumlah pemilih tetap di asrama atau perumahan militer untuk mengkaji seberapa besar dukungan suara keluarga militer dapat dijadikan modal untuk kemenangan pilgub. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pembaca yang tertarik kajian mantan militer dalam pemilihan kepala daerah, untuk mengkaji seberapa besar jumlah perolehan suara mantan militer di daerah-daerah yang dihuni oleh keluarga militer, misalnya dalam suatu asrama atau perumahan militer.

## **3. Implikasi**

Adapun yang menjadi implikasi dari hasil studi berupa implikasi metodologi, yaitu dengan memilih subjek penelitian berupa media sosial berupa Instagram milik mantan militer yang maju dalam pemilihan gubernur. Metode ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menganalisis terkait upaya kandidat untuk meraih dukungan suara pemilih pemula atau pun generasi *millennial* yang selalu aktif di media sosial. Upaya untuk meraih dukungan dari pemilih pemula dapat dilihat dari setiap unggahan kandidat di media sosial.

## DAFTAR RUJUKAN

- Crouch, Harold. 1985. *Military-Civilian Relations South-East Asia*. New York: Oxford University Press.
- Syahnakri, Kiki. 2009. *Aku Hanya Tentara (Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan)*. Jakarta: Kompas.
- Haryanto, 2005. *Kekuasaan Elite (Suatu Bahasan Pengantar)*. Yogyakarta: Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah.
- Haryanto, (2017). "Konfigurasi Elite dan Demokrasi (Aktor, Sumber Daya, dan Strategi Kontestasi)." *Jurnal Prisma, Volume 36. 2017. Negara, Kesejahteraan dan Demokrasi*. Depok: LP3ES.
- Harun, Rochajat & Sumarno. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Bimo Wiwoho, 2018. Hasrat Politik Para Jenderal di Pilkada 2018. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180108085325-32-267327/hasrat-politik-para-jenderal-di-pilkada-2018>.
- Setyanavidita Livikacansera, 2016. Mengenal Generasi Millennial. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial/>.
- Reja Hidayat, 2018. Perang Perwira TNI dan Polri dalam Pilkada 2018. Retrieved from <https://tirto.id/perang-perwira-tni-dan-polri-dalam-pilkada-2018-cC1M>.
- Estu Suryowati, 2017. Potensi Konflik Pilkada dengan Calon dari TNI-Polri Dinilai Lebih Tinggi. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/08550761/potensi-konflik-pilkada-dengan-calon-dari-tni-polri-dinilai-lebih-tinggi>.
- Zunita Amalia Putri, 2017. Letjen Edy: Doakan Saya Jadi Gubernur, Bukan Jadi KSAD. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/letjed-edy-doakan-saya-jadi-gubernur-bukan-ksad>.
- Bambang Noroyono, 2017. Pangkostrad: Pengunduran Diri Saya Sudah Diterima. Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/12/20/p18gur385-pangkostrad-pengunduran-diri-saya-sudah-diterima>.